

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KAMPUNG WISATA KOTA BANDUNG**
*(LOCAL GOVERNMENT ROLE IN COMMUNITY EMPOWERMENT
IN TOURISM VILLAGES IN BANDUNG CITY)*

Lia Afriza

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI

liaafriza@gmail.com

ABSTRACT

Tourism is a field that is currently rising in rank in driving the community's economic growth. Where the role of the government is to support in encouraging the growth of the community's empowerment in tourist villages. The aim of the research is to determine the role of the government in encouraging tourism growth in tourist villages in Bandung City. By encouraging involvement in community empowerment and creating policies, they are intended to support the community empowerment in Bandung City tourist villages. The type of research is descriptive qualitative research with data collection techniques using triangulation techniques (interviews, observations, and documentation studies).

The result of the research shows that the role of the government based on theories is related to the entrepreneurial indicators, coordination and facilitators have been implemented, however in the process of implementing, the results that was obtained was not optimized. Meanwhile, the community's empowerment with the dimensions of enabling, empowering, and protecting had also been implemented, but there is still a lack of continuous/periodic supervision and innovation in solving problems that occur in tourist villages. The suggestions to these is to build more participatory programs, to make innovations in solving problems and to increase supervision.

Keywords: Government Role, Empowerment

ABSTRAK

Pariwisata merupakan bidang yang sedang naik peringkat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Dimana peran pemerintah sebagai suatu proses dalam mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat dikampung wisata. Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pariwisata di kampung wisata di kota Bandung. Dengan mendorong pelibatan pemberdayaan masyarakat dan kebijakan yang dibuat untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di kampung wisata kota bandung. Jenis penelitaian adalah penelitian kualitaitaif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui Teknik trianggulasi (wawancara, observasi dan studi dokumentasi).

Hasil penelitian bahwa peran pemerintah berdasarkan teori terkait indikator *entrepreneur*, koordinasi dan fasilitator sudah dilaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaan hasil yang didapat belum optimal. Sedangkan untuk pemberdayaan Masyarakat dengan dimensi *enabling*, *empowering* dan *protectiong*, juga telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaan masih kurang pengawasan secara kontinyu / berkala, dan inovasi dalam pemecahan masalah yang terjadi di kampung wisata. Saran yang diajukan yaitu membangun program yang lebih partisipatif, membuat inovasi dalam memecahkan masalah dan peningkatan pengawasan.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Pemerintah dan masyarakat merupakan pilar utama dalam menyelenggarakan pemerintahan, semakin baik peran pemerintah dalam menyelenggarakan, semakin baik pula peningkatan pemabangunan dan akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan undang undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana daerah diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengurus segala urusan penyelenggaraan pemerintah secara otonom.

Salah satu peran pemerintah dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah pemberdayaan masyarakat pemerintah menjadi stimulator bagi Masyarakat untuk bergerak dan bertindak agar berkembang sehingga masyarakat menjadi produktif. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu jalan menjadikan masyarakat Sejahtera. Pembangunan pariwisata melalui kampung menjadikan kampung wisata sesuai dengan hakekat pariwisata, dengan membangun pariwisata dapat mendorong pertumbuhan kota, pengentasan kemiskinan, dengan menciptakan peluang pekerjaan, melestarikan lingkungan dan budaya local.

Kujungan wisata ke kota bandung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi pada era pandemi menurun drastis dikarenakan adanya lockdown dimana Masyarakat tidak melakukan bepergian. Setelah pandemi kunjungan ke kota bandung berangsur meningkat lagi tahun 2022 sebanyak 6,8 juta pengunjung dan Tahun 2023 pengunjung 7,7 juta.

Kota Bandung memiliki beberapa kampung wisata yang tentunya berpotensi dan dapat dikembangkan, dalam pengembangan pariwisata yang ada dalam tata Kelola destinasi kampung wisata dapat dibentuk sebagai kampung wisata tematik. Adapun kampung wisata yang sudah di resmikan sebagai berikut;

Tabel 1
Kampung Wisata

| No. | Kampung Wisata | Tematik |
|-----|---------------------------------|----------|
| 1 | Kampung wisata Braga | Heritage |
| 2 | Kampung wisata Cibeunying kaler | Batik |

| No. | Kampung Wisata | Tematik |
|-----|----------------------------|------------------------------|
| 3 | Kampung wisata Binong jati | Industri rajut |
| 4 | Kampung wisata Cibaduyut | Industri sepatu |
| 5 | Kampung wisata Cinambo | Daur ulang sampah |
| | Kampung wisata Dago pojok | Budaya |
| 7 | Kampung wisata Cigondewah | Sentra penjualan kain kiloan |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Masyarakat di Kawasan kampung wisata kota bandung.

Tinjauan Pustaka

a. Konsep pemberdayaan masyarakat

Memberdayakan mengandung pengertianempukan masyarakat menuju kemandirian dan pengembangan kapasitas. Sedangkan kemandirian, mampu memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk menunjukkan ciri sebagai Masyarakat yang ikut berpartisipasi terhadap Pembangunan sumberdaya manusia oleh pemerintah serta berperan aktif dalam pengembangan kapasitas diri agar Pembangunan dapat dilakukan secara terarah, dalam Widjaja (2017:77)

Pemberdayaan atau empowerment termasuk dalam konsep pembangunan otonomi daerah untuk meningkatkan potensi daya guna masyraka. Pemberdayaan di dalam meningktkan potensi masusia agar dapat berorientasi pada pertanggung jawaban dengan melakukan segala bentuk pekerjaan yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai kualitas sumber daya manusia yang dapat Sejahtera dan mandiri dalam bidang yang ditekuni untuk mencapai tujua.

Konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan tertekanan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisishan, kebangkitan dari kelelahan, dalam hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan (powerless), dalam sumaryadi (2013,57).

b. Teori Pemberdayaan

Menurut Kartasusmita dalam mulyawan (2016:67-68) upaya memberdayakan Masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek yaitu: 1) *enabling*, 2) *empowering*, 3) *protecting*. Ketiga hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Enabling*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi Masyarakat berkembang. Pada intinya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyrakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak Masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena kalua demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah Upaya untuk membangun daya itu dengan dorongan (*encourage*), motivasi dan membangkitkan kesadaran, (*awareness*)

akan potensi yang dimilikinya seta berupaya untuk mengembangkan.

- 2) *Empowering*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat pada bagian ini diperlukan Langkah yang lebih nyata dari pada menciptakan iklim dan suasana. Langkah nyata yang dimaksud adalah lebih membuka dan melihat peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat lebih berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang dianggap paling dasar adalah meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan, dan kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, peluang pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana pra sarana fisik (jalan, listrik, irigasi, jembatan) dan sosial (sekolah, fasilitas kesehatan, ketersediaan lembaga pendanaan, pelatihan,dll).
- 3) *Protecting*, Memberdayakan mengandung pula arti melindungi mengandung konsep mencegah yang lemah semakin lemah dan yang kuat semakin berdaya. Arti melindungi adalah mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam persaingan serta eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan bukan membuat masyarakat semakin tergantung tetapi sebaliknya menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik, sejahtera dan mencapai kemandirian.

Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakikatnya harus diarahkan pada beberapa hal sebagai, berikut:

- 1) Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan,
- 2) Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat.
- 3) Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat,
- 4) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melaukukan perjalanan wisata (Sunaryo, 2013: 219).

Apabila dikaitkan dengan pemberdayaan maka peran pemerintah yang sesuai dengan nilai-nilai pemberdayaan dapat diambil salah satunya adalah menurut Munir (2016) terdiri dari entrepreneur, koordinator, dan fasilitator. Ketiga indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar peran yang dilakukan oleh pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN

Proses penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang menyatakan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), teknik analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang datanya berupa kata-kata tertulis, uraian yang diperoleh dari informan, dan perilaku subjek yang diamati.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kampung wisata merupakan salah satu daya Tarik lain di kota Bandung yang mendapat julukan kota kreatif baik dari budaya, kuliner maupun fashion. Bandung sangat minim dengan daya Tarik alam, tetapi dengan adanya kampung- kampung wisata Dimana didalam wilayah memiliki keunikan yang belum tereksplora secara optimal. Keunikan yang dimiliki dari kampung wisata saling berbeda dilihat dari wilayah, mata pencaharian atau kreatifitas Masyarakat. Kampung wisata wilayah Braga dikenal dengan heritage, Dimana berdiri bangunan- bangunan bersejarah dan masih terpelihara akan keutuhan nilai dari arsitekturnya maupun Sejarah yang melekat. Kampung wisata cigondewah dengan keunikan Masyarakat dari mata pencaharian dari masyarakatnya dengan berjualan kain kiloan juga dengan kampung rajut Cibinong Jati Dimana Sebagian besar masyarakatnya membuat rajutan dan menghasilkan kaos dan pernak Pernik dari rajutan. Dari tujuh kampung wisata di kota Bandung memiliki kekhasan dan keunikan dari masing-masing wilayah yang akan memperkaya daya Tarik dari kota Bandung.

Salah satu penguatan dalam mengembangkan kampung wisata dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dari masing – masing kampung wisata untuk mengeksplora berapa banyak Masyarakat bisa ikut terlibat dengan menjadi kampungnya sebagai tempat wisata. Wisatawan datang ke wilayah bisa banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi seperti wisatawan berkunjung ke kampung wisata Braga melakukan *working tour* (selusur kampung) untuk menikmati keindahan bangunan dan budaya/ kehidupan Masyarakat. Dengan melakukan *working tour* wisatawan dapat mengenal budaya, nilai-nilai Sejarah Masyarakat, dan masyarakat dapat terlibat sebagai pemandu, tukang foto, atau memberikan layanan makanan minuman sebagai jajanan khas di wilayahnya. Bahkan juga kerajinan yang dibuat masyarakat sebagai souvenir.

Untuk memenuhi kemampuan dan keterlibatan Masyarakat ada peran pemerintah untuk memberikan informasi, pelatihan, Pendidikan bahkan menyiapkan regulasinya dalam membangun dan mengembangkan kampung wisata sebagai daya Tarik wisata. Dikaitkan dengan pemberdayaan maka peran pemerintah yang sesuai dengan nilai-nilai pemberdayaan dapat diambil salah satunya adalah menurut Munir (2016) terdiri dari entrepreneur, koordinator, dan fasilitator. Ketiga indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar peran yang dilakukan oleh pemerintah. Maka hasil penelitian yang dilakukan terkait peran pemerintah maka diperoleh informasi:

- a. *Eunpreneur*, Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk membangun dan melaksanakan Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, budaya, sosial dan lingkungan. Hal ini membangun Masyarakat mampu menggali potensi yang dimiliki yang rutin menjadi mata pencaharian mereka dan menjadikan *double income*, sedangkan untuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi peluang kerja sebagai akibat ada tambahan Aktivitas wisata. Aktivitas usaha yang dibangun dengan mengembangkan pariwisata, pemerintah mengembangkan fasilitas Di Kampung Wisata, seperti di kampung wisata Kreatif Braga terdapat *Co-Working Space* percontohan pertama di Kota Bandung yang menjadi tempat bagi masyarakat maupun komunitas untuk mengembangkan usaha pada tahap awal. Di *Co-Working Space* juga terdapat berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan masyarakat di Kampung Wisata Kreatif Braga. Diantaranya fasilitas ruangan kantor yang bisa

digunakan bersama-sama. Disini juga menyediakan layanan konsultasi bisnis dan profesi dari berbagai pihak yang mendukung Kampung Wisata Kreatif Braga. Selain itu juga ada pelatihan menjahit, melukis, merakit lampu dan kreativitas berbasis ekonomi lainnya. *Co-Working Space* biasanya juga kerap menyelenggarakan program *skill development* dan inkubasi bisnis secara sistematis, terjadwal, dan terukur yang dapat membangun iklim sinergi dan membantu akses individu maupun komunitas dengan jaringan bisnis dan profesional.

co working space dalam mendukung Pembangunan pariwisata di kampung wisata, *co-working space*. Selain itu pemerintah juga Kerjasama dengan CSR (*corporate sosial responsibility*) membangun teras braga untuk menampung kuliner warga yang secara otomatis akan membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya.

Bahkan dalam dukungan sebagai janji politik dari walikota akan menyelesaikan/mengaktivasi 7 kampung wisata yang ada di kota bandung dengan keunikan yang berbeda sesuai dengan budaya dan keunikan yang dimiliki. Dengan janji tersebut melalui dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung konsen untuk penguatan kemampuan Sumberdaya manusia dengan memberikan pembinaan melalui pelatihan dan pendampingan di kampung wisata.

- b. Koordinator, membangun pariwisata tidak dapat dilakukan sendiri oleh dinas kebudayaan dan pariwisata. Perlu membangun koordinasi antar dinas dan sektor laiseten yang dikenal dengan Pentahelik (pemerintah, masyarakat, akademisi, usaha pariwisata dan media). Koordinasi dengan dinas lain juga diperlukan karena pariwisata akan bersinggungan dengan berbagai dinas dalam memenuhi aksesibilitas, jalan, bangunan perlu berhubungan dengan dinas PUPR, rambu rambu lalu lintas sebagai penamaan dan penunjuk arah akan berhubungan dengan dinas Perhubungan. Berkaitan dengan sampat, taman dan lingkungan juga berhubungan dengan dinas-dinas terkait dibidangnya hal ini memerlukan kolaborasi antar instansi dengan *leading* sektornya dinas kebudayaan dan pariwisata.

Diluar pemerintahan dinas kebudayaan dan pariwisata juga melakukan Kerjasama dengan akademisi dalam membangun Sumber Daya melalui pelatihan dan pendampingan. Keterlibatan koordinasi lain antar Perguruan tinggi dengan dinas, Kerjasama dalam pengabdian masyarakat dan melakukan riset yang dapat bermanfaat buat dinas dalam menjalankan kebijakannya dan Upaya dalam membangun pariwisata kota bandung.

Selain dengan Akademisi, ada usaha pariwisata seperti PHRI, ASITA, HPI dll yang membantu dalam membangun SDM dari Masyarakat menjadi berkemampuan atau membangun skillnya. Juga peran media tidak kalah pentingnya dibangun untuk menginformasikan kampung-kampung wisata di kota bandung dengan berbagai jenis keunikan yang dimilikinya.

Koordinasi dari berbagai dinas, instansi dibangun untuk saling melengkapi dan memberikan warna kepada masyarakat akan pentingnya daya Tarik wisata di kampung wisata menjadi menarik dan tertata dengan baik sehingga diminati oleh pengunjung untuk dikunjungi ketika berkunjung ke kota bandung.

- c. Fasilitator, peran pemerintah sebagai fasilitator mempercepat Pembangunan melalui perbaikan lingkungan merupakan salah satu factor penunjang keberhasilan usaha, dapat dilihat lingkungan apa yang tidak baik untuk suatu usaha. Berdasarkan hasil wawancara, yang terimbas dengan adanya kampung wisata menjadi peminat berkunjung banyak yang berimbas pada sampah dan parkir kendaraan yang berkunjung membludak, bahkan kadang kampung tersebut menjadi kumuh karena menumpuknya sampah dan pencemaran udara dari knalpot kendaraan. Perlu kesigapan pemerintah dalam menyelesaikan persampahan di sekitar wilayah tidak hanya sekali dalam satu hari diambil minimal ada pembuangan sementara sehingga perkotaan, pemandangan Gedung dan taman yang indah tetap cantik dan tidak bau busuk. Masalah yang berikutnya keterbatasan lahan parkir yang sangat minim, dan pemerintah kota wajib memikirkan lokasi parkir yang disediakan sehingga tidak memacetkan lalu lintas disekitaran kampung wisata.

Peran pemerintah dalam membangun lingkungan yang sehat merupakan hal yang sangat penting keindahan dan nyaman untuk berkunjung merupakan kunci utama dalam berwisata sehingga peningkatan fasilitas yang menunjang perlu lebih difokuskan untuk disediakan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Enabling*, Pembangunan kampung wisata mampu menambah/meningkatkan daya Tarik baru di kota Bandung yang minim dengan daya Tarik alam. Dan dengan tumbuhnya kampung wisata sebagai daya Tarik akan memberikan peluang peningkatan secara ekonomi buat Masyarakat, peluang memberikan lapangan pekerjaan juga, sebagai stimulus pemerintah meberikan berbagai bantuan untuk memotivasi masyarakat siap dalam membangun dan mengembangkan usahanya, tetapi adakalanya bantuan tidak termanfaatkan dengan baik karen skill manusia perlu terus ditingkatkan dan tidak hanya dilatih pada saat itu saja.
2. Dengan membangun sarana dan prasarana fisik seperti memberikan bantuan akan kelengkapan seperti toilet umum yang dapat di manfaatkan oleh wisatawan Ketika berkunjung di kampung wisata, penerangan jalan di gang-gang wilayah kampung wisata dan papan interpreter / papan informasi / penunjuk arah. Secara umum juga menyiapkan lokasi parkir dengan Kerjasama dengan dinar yang mengurus perparkiran perkatoran atau mall yang ada disekitar wilayah yang berdekatan dengan kampung wisata
3. *Protecting*, upaya pemerintah untuk tetap menjaga kelangsungan keberadaan kampung- kampung wisata dengan melakukan pengawasan atau dengan meluncurkan program-program pengembangan kampung wisata.
4. Tujuan akhir dari pemberdayaan Masyarakat adalah mencapai kesejahteraan dan kemandirian bagi Masyarakat.

Rekomendasi

1. Pemerintah perlu secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi untuk

- memantau dan mengawasi perkembangan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kampung wisata. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pengetahuannya mengenai setiap perkembangan baru yang terjadi, sehingga upaya pembangunan dapat berkelanjutan.
2. Diperlukan kerjasama dengan berbagai instansi dan dinas dalam membangun infrastruktur fisik, seperti dukungan dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN dan industri pariwisata, untuk menciptakan kenyamanan di sekitar kawasan kampung wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilangga, R, Alfian, Y., dan Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bndung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2024) *Membangun Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Refika Aditama.
- Sumaryadi, I. N. (2013). *Sosiologi Pemerintahan, dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Undang Undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah